

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)



Jl. KABUPATEN II No. 1 APO – DISTRIK JAYAPURA UTARA
Website bp2tsp.jayapura.go.id
Email: bpptsp_jayapurakota@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sezinnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dapat disusun.

Dokumen ini menyajikan Rencana Program dan Kegiatan dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura selama 4 tahun yaitu Tahun 2023 - 2026.

Demi terlaksananya target rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama 5 tahun yaitu harus sesuai dengan target kinerja yang termuat dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026.

Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD sesuai Tugas dan Fungsinya yaitu Menentukan Kebijakan dan Strategis Pengembangan Investasi Penanaman Modal di Kota Jayapura. Maka kami berharap dukungan dari semua Stekholder dan berbagai pihak terkait yang berada di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura masih jauh dari sempurna oleh karena saran dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan.

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



FILIP C. HAMADI, SE
Kepala Dinas TK. I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud & Tujuan.....	5
1.4. Sistematika	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	7
2.2. Sumber Daya DPMPTSP.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal.....	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1. Identifikasi Permasalahan	26
3.2. Penentuan Isu Strategis	29
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.4. Analisis SWOT.....	33
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan dan sasaran.....	30

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	37
5.1 Strategi	37
5.2 kebijakan	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	39
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII.PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 2.3 Komposisi pegawai DPMPTSP Berdasarkan Jabatan	11
Tabel 2.3 Komposisi pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.4 Komposisi pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana.....	11
Tabel 2.6 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan	16
Tabel 2.7 Realisasi Investasi di Kota Jayapura	17
Tabel 2.8 Jumlah Investor PMA dan PMDN	18
Tabel 2.9 Peringkat Investasi Izin Usaha Berdasarkan Lokasi Usaha	18
Tabel 2.10 Rekapitulasi jumlah investasi izin jasa usaha berdasarkan Kualifikasi usaha.....	18
Tabel 2.11 Realisasi terhadap kinerja dari 79 jenis Pelayanan Perizinan	20
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Jayapura	36
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Utama	38
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kedudukan Renstra Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	3
Gambar 2	Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 3	Struktur Organisasi DPMPTSP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DPMPTSP sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura ini sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Surat Peraturan Walikota NO 31 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura yaitu Menyusun dan Melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal yang meliputi promosi dan penggalan potensi penanaman modal, pengendalian, pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi promosi investasi, pengembangan penanaman modal dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

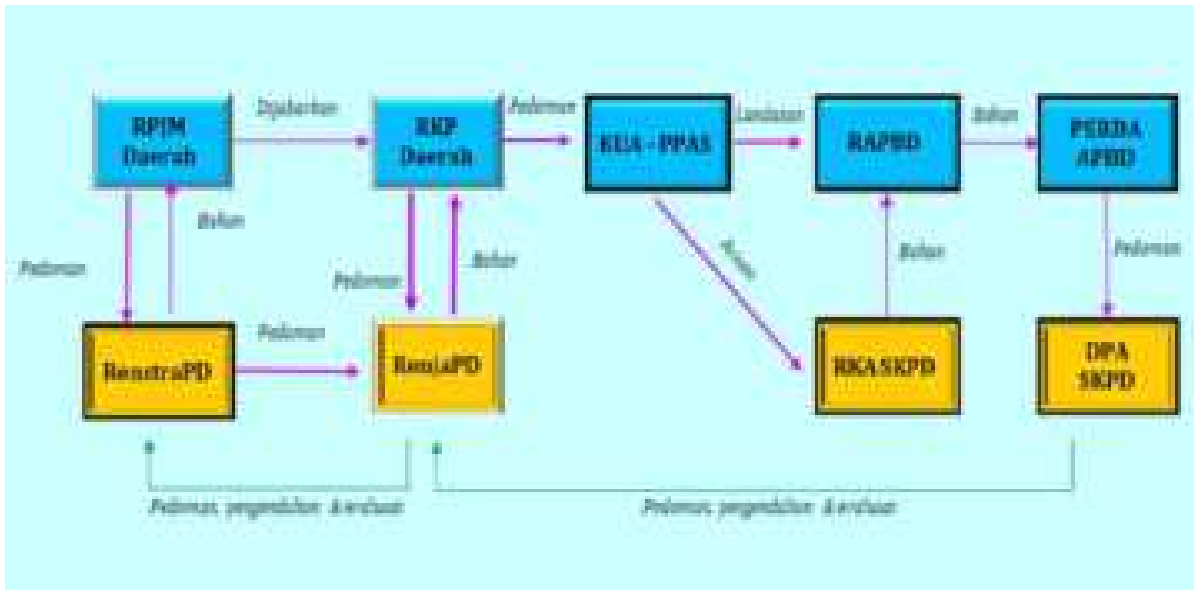
Tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, percepatan pemberian izin dan non izin dan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan.

Sedangkan peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kota Jayapura dengan potensi unggulan pada sektor konstruksi, perdagangan dan jasa, informasi dan komunikasi, pertanian, kehutanan dan perikanan, real estate, transportasi dan perdagangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum serta industri pengolahan. Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kota Jayapura.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Jayapura antara melaksanakan promosi peluang investasi potensi unggulan Kota Jayapura didalam dan diluar negeri dan optimalisasi pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura berpedoman pada Visi dan Misi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) periode tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Daerah yaitu "Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera". Misi Pembangunan Daerah yaitu "Mewujudkan Kota Jayapura sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa".

Gambar 1.
Kedudukan Renstra Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Gambar 2.
Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura;
13. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura;
14. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
17. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Kepmendagri 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 yaitu :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura;
- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jayapura tahun 2023-2026 Dalam Mewujudkan Kota Jayapura sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, yaitu :

- 1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam pencapaian

tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura;

- 2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura;
- 3) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun 4 (empat) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dijelaskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam 4 (empat) tahun mendatang ;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Dinas ini sebagai pengembangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Adapun ***Tugas Pokok dan Fungsi*** Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Surat Peraturan Walikota No 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yaitu ***Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang meliputi Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal, Pengendalian, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.***

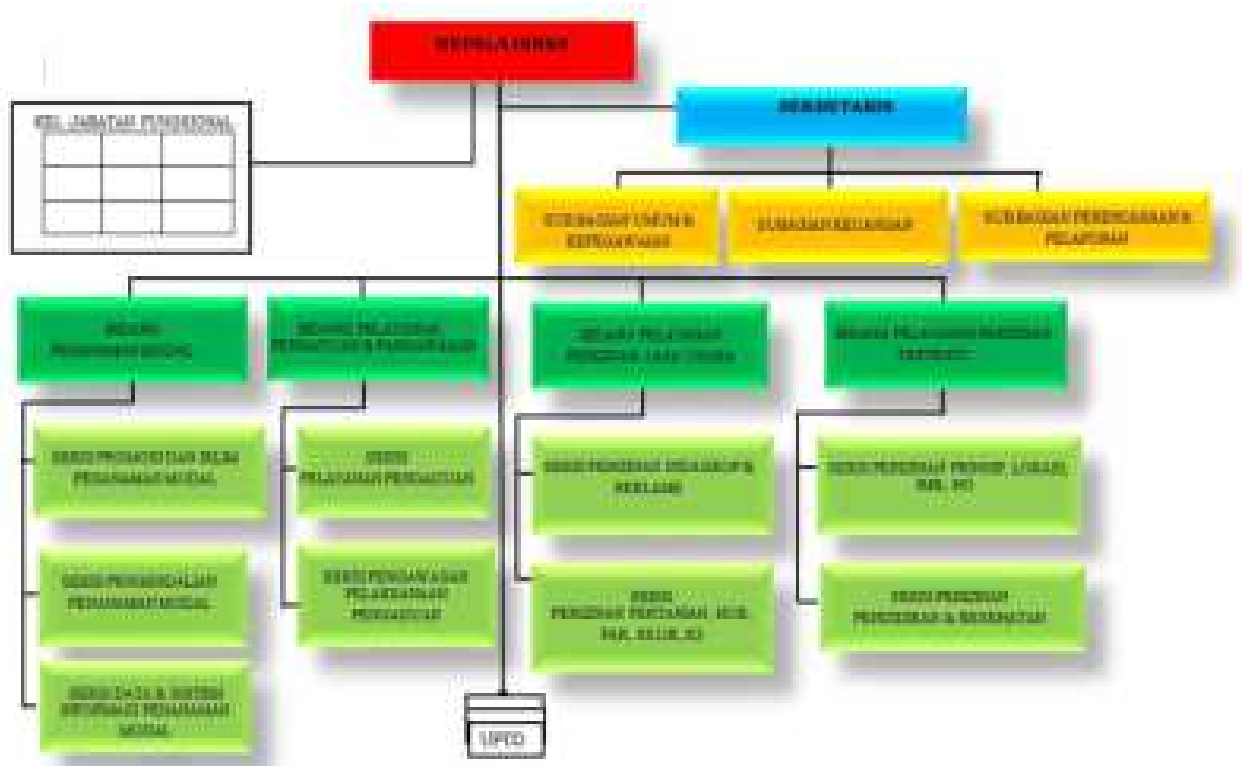
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mempunyai ***fungsi : Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi Investasi, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.***

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jayapura.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura terdiri dari :

- (1)** Kepala Dinas membawahi;
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Perizinan Jasa Usaha;
 - e. Bidang Perizinan Tertentu;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)** Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3)** Bidang Penanaman Modal;
 - a. Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (4)** Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahkan :
 - a. Seksi Perizinan Indakop dan Reklame;
 - b. Seksi Perizinan Perikanan, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3;
- (5)** Bidang Perizinan Tertentu, membawahkan:
 - a. Seksi Perizinan Prinsip Lokasi, IMB dan Ho;
 - b. Seksi Perizinan Pendidikan dan Kesehatan;
- (6)** Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Pengaduan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelaksanaan Pengaduan;
- (7)** Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8)** Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Sumber Daya Aparatur/Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan Struktural, Pangkat dan Golongan dan Tingkat Pendidikan.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Jenis Kelamin.

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	LAKI-LAKI	18	18	19	21	21
2	PEREMPUAN	12	12	11	15	15
TOTAL		30	30	30	36	36

Tabel. 2.2

Perbandingan Jabatan Struktural Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon IIb	-
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	4
4	Eselon IVa	12
	JUMLAH	17

- Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Perzinan Terpadu Satu Pintu sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme berencana.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	1
2	II	5
3	III	28
4	IV	2
	JUMLAH	36

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	1
2	SLTA	7
3	Akademi	-
4	Strata 1 (S1)	24
5	Strata 2 (S2)	4
6	Strata 3 (S3)	-
	JUMLAH	36

Tabel 2.5

b. Sarana dan Prasarana

N O.	NAM A BAR ANG/ JENIS BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN PEMBELIAN	BAIK	RUSAK/ HILANG	JUMLAH BARANG
1	Mobil		2014			1 Unit
2	Rak Server Fortuna	FORTUNA 19"CLOSE RACK 300 RACK DEPTH 900MM, COMPLETE.	2014			1 Unit
3	Komputer Server	HP. PROUNGT DL160 GEN8 E5- 2603BIP. 4GB-R SATTA 4 LFF 500W PS	2014			1 Unit
4	UPS 12000	APC SUA A 3000 RMX LI3U	20014			1 Unit
5	PC All in One	Lenova Think Centre Edge 72z All in One PC	2014			10 Unit
6	Akses Point	Tplink- WA5210G 2.4.GHZ Higt Wireles	2014			2 Unit
7	Printer Infus Original	EPSON L. 110	2014			3 Unit
8	Printer Dormatrik	EPSON LX 310	2014			3 Unit
9	Printer Laser Jet	HP LaserJet Pro CP 1025	2014			1 Unit
10	SWITCH HUB 24 PART	Dlink DES-1024D	2014			2 Unit
11	Laptop	TOSHIBA, Satelrte C40D-A	2014			2 Unit
12	Kursi Bandara Seat 4	BESI	2014			6 Buah
13	Rak Pianto 3 Susun	Besi	2014			15 Buah
14	PC All in One	Ienovo Edge 722-3574	2014			4 Unit
15	PC All in One	Ienovo C540-2550	2014			1 Unit
16	Printer Epson	Epson LX-310-11	2014			3 Unit
17	Printer Epson	Epson L350	2014			4 Unit
18	Sofa Sudut	Comer	2014			2 Set
19	Kursi Staf	Indachi D-920	2014			6 Buah

20	Papan Nama Locket	Fiber	2014			6 Buah
21	Tempat Sampah	Steinless Krisbow	2014			8 Buah
22	Tempat Sampah Roda	Krisbow	2014			2 Buah
23	Tempat Sampah Piastik	Plastik	2014			10 Buah
24	TV LED	LG 42 Inch	2014			3 Unit
25	Kulkas 2 Pintu	Sharp GR-Y 228JZ-TI	2014			1 Unit
26	Jam Dinding Besar	Mirado	2014			2 Buah
27	Jam Dinding Kecil	Mirado	2014			4 Buah
28	Cermin	Kaca	2014			6 Buah
29	Dispenser	Midea YI-1136 S	2014			5 Buah
30	Pot Bunga	Kayu	2014			6 Buah
31	Meja Rapat Kayu	Ligna	2014			1 Set
32	Meja Pimpinan 1 Biro	Kayu	2014			1 Buah
33	Mesin Absensi	Fingerspot Enterprise 2000	2014			1 Unit
34	Crimping Tool	Amp Cat 5e	2014			1 Buah
35	Kotak Saran	Kayu	2014			1 Buah
36	Mesin Foto Copy	Canon IR2S20	2014			1 Unit
37	Meja 1 Biro	LX1630	2014			4 Buah
38	Meja Samping	LX60S0	2014			4 Buah
39	Kursi		2014			30 Buah
40	LCD Proyektor	Epson EBx100	2014			1 Unit
41	Acer	Acer E1 410	2014			1 Unit
42	Brankas	Yunita Digital TT 4610	2014			1 Buah
43	Amplifier	BMB 200	2014			1 Unit
44	Speaker	BMB 200	2014			2 Buah
45	Mic Wireless	BBS DX4	2014			4 Buah
46	Rak Amplifier	Activ	2014			1 Buah
47	Rak Proyektor	Activ	2014			1 Buah

48	Layar Proyektor	Standing 70x70 inch	2014			1 Buah
49	Mic wireles	Aiwa AW 139	2014			1 Buah
50	Stavolt oki 1500 Wath	Oki 1500 Watt	2014			1 Buah
51	Standing Speaker		2014			2 Buah
52	Lemari Arsip Kecil	Ligna	2014			6 Buah
53	Lemari iArsip Besar	Ligna	2014			4 Buah
54	Lemari Arsip Kecil	Ligna	2014			1 Buah
55	Sofa Tamu	Ligna	2014			1 Set
56	Meja 1/2 Biro	Ligna	2014			15 Buah
57	Meja Pimpinan	Ligna	2014			4 Buah
58	Meja Samping	Ligna	2014			3 Buah
59	Meja Pimpinan	Ligna	2014			1 Buah
60	Kursi Pimpinan	Best	2014			14 Buah
61	AC	Poltron	2014			1 Buah
62	AC	LG	2014			12 Buah
63	Komputer Pavilion 20 fi	HP	2014			5 Unit
64	P5 Prolinik	HP	2014			5 Unit
65	Meja Komputer	Ligna	2014			6 Buah
66	Printer Laser Jet	HP. Laser Zet P1102	2014			5 Buah
67	Komputer Deskop AH-In-One	Intel Core I3-3240, 2GB DDR3, 500 GB HDD, DVD-RW VGA Integrate, Audio, NIC WFI, Camera, 20" WXGA	2014			1 Buah
68	UPS 650 va	Opine, UPS 6S0 VA Auto Restar While AC Is Ricovering Single phase, Tower	2015			1 Unit
69	Printer Inkjet	Printer Inkjet A4, 4800x1200 dpi Canon	2015			1 Unit
70	Telpon Intercom	Panasonic	2015			7 Buah
71	PC All in One Lenovo C225	Lenovo C225	2015			4 Unit

72	GPS	Garmin Montana 6S0	2015			1 Unit
73	Wireless Amplifier	Berline SB888	2015			1 Unit
74	Printer	Epson L350	2015			2 Unit
75	Printer	Epson L120	2015			2 Unit
76	Hard disk Eksternal	Seagota 500Gb	2015			4 Unit
77	Meja 1/2 Biro	Ofmo 1260	2015			2 Buah
78	Meja 1 Biro	Ofino 1460 S	2015			2 Buah
79	Lemari	Galant SC81G Archive	2015			2 Buah
80	Kursi rapat	Caesar N	2015			8 Buah
81	Lema	GalantSC80G	2015			1 Buah
82	Camera	Canon Ixus 145	2015			2 Buah
83	ADF Scanner	PS286 Plus	2015			2 Buah
84	Modern SMS	Wavecom	2015			1 Buah
85	Kios K Informasi		2016			1 Buah
86	GPS		2016			1 Buah
87	Camera		2016			1 Buah
88	Baterai Charger	aPC/APC	2016			1 Buah
89	Personal Komputer		2016			1 Buah
90	PC Unit/Komputer/PC		2016			3 Buah
91	Printer	Epson/	2016			2 Buah
92	UPS		2016			1 Buah
93	UPS		2016			11 Buah
94	Harddisk External		2016			4 Buah
95	Mouse		2016			4 Buah
96	Peralatan Jarngan/lain-2					

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

2.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).

Berdasarkan capaian Kinerja dari Renstra 2018 s.d 2021, dapat dilihat Realisasi Investasi berdasarkan Ijin Jasa Usaha dari capaian tahunan, yaitu pada tahun 2018 Rp 3,119,863,828,701,- tahun 2019 Rp. 1,425,609,733,079,- tahun 2020 Rp 13,151,280,803,584,- dan tahun 2021 Rp. 2,676,091,916,893,-

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang merupakan salah satu OPD Teknis yang dapat memberikan pemasukkan pada pendapatan daerah melalui retribusi perizinan ditinjau sejak tahun 2018 s.d 2021, sebagai berikut;

Tabel. 2.6

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tahun 2018 s/d 2022

No	Jenis Perizinan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Retribusi Perizinan Tetentu					
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.748.501.041	2.506.920.000	1.887.222.000	6.157.685.000	869.845.000
2	Retribusi Jasa Usaha					
	1. Retribusi Ijin Trayek	671.335.000	634.982.000	358.035.000	385.492.000	117.689.000
	2. Retribusi Izin Usaha Perikanan	67.853.000	23.231.000	10.601.000	5.548.000	0
	Jumlah Total	6.487.689.041	3.165.133.000	2.255.858.000	6.548.725.000	987.534.000

Tabel. 2.7

Capaian Kinerja Program, Kegiatan DPMPSTP

No	Indikator Kinerja sesuai Target dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rerotre Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Meningkatnya Jumlah Investasi PMA dan PMA2N				48	58	78	88	98	2027	1813	2615	2916	18123					
2	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMA2N				81.404,2 Triliun	83.888,4 Triliun	89.071,4 Triliun	71.834,3 Triliun	74.707,8 Triliun	2.119.802.000.191	3.422.899.731.078	11.151.286.892.184	1.079.891.878.884	3.422.891.404.322					
3	Persentase Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMA2N				4	4	4	4	4	1.750 Milyar	30,31%	115,03%	95,99%						
4	Pelaksanaan Program Investasi Persepsi Daerah				0	3	3	3	3	1	1	0	0	0					
5	Persentase Peningkatan Persepsi dan Persepsi Tepat Waktu				80	87	88	97	90	80%	85%	85%	85%						
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM)				81	83	84	82	82	85%	88,18%	82,21%	85,14%						
7	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi				3	3	4	4	3	9%	3,14	3,2	3,5						
8	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat				1	1	1	1	1	5 org	17 org	3 org	0	0					
9	Meningkatnya Nilai SAKIP Desa				C	B	B	BB	AA	CC	BB	BB	BB						

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan DPMPSTP

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
				Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp				
4	5	6			11	13								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik dan Representatif		225.000.000	158.800.000	100.000.000								
	Pengelolaan Manajemen Kearsipan Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah fasilitas kearsipan	75.000.000	75.000.000	79.400.000			74.980.000	79.400.000			99,97	100	
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan Elektronik (SPIPESE/OSS) Bidang Penanaman Modal			150.000.000										
	Pengelolaan Manejemen Kearsipan berbasis Elektronik	Prosentasi Pengarsipan Data Perizinan secara elektronik			79.400.000	100.000.000								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah peningkatan Investor PMA		350.000.000	260.177.390,00	42.500.000								
		Jumlah Peningkatan Investor PMDN							350					
	Pameran Investasi PM	Jumlah event yang diikuti												
	Sosialisasi Perizinan Tertentu	Jumlah Sarana Sosialisasi			78.077.390,00				78.077.390				100	
	Sosialisasi Kebijakan DPM & PTSP Kota Jayapura	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan PTSP dan PM	150.000.000	150.000.000	82.100.000,00		150.000.000	150.000.000	82.100.000		100	100	100	
	Promosi Investasi Melalui Media Cetak/ elektronik	Jumlah promosi investasi melalui Media Cetak	100.000.000	100.000.000			18.990.000	88.160.000			19	88		
	Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta Koordinasi dan kerjasama	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	42.500.000	100.000.000	99.999.610	100.000.000	39.219.000	100	100	100	92,28

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Nilai Investasi PMA		450.000.000	Rp 395.000.000	315.561.000								
		Peningkatan Jumlah Nilai Investasi PMDN												
	Riveuw SP dan SOP	Jumlah Dokumen SP dan SOP				52.000.000				52.000.000				100
	Forum Komunikasi pelayanan Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan												
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Jumlah dokumen				50.000.000								
	pengembangan sistem Aplikasi Perizinan dan penanaman Modal	Prosentasi penyediaan Sistem aplikasi PTSP dan PM	250.000.000	250.000.000	245.000.000,00	213.561.000	104.872.740	205.273.700	245.000.000	212.706.756	42	82	100	99,60
	Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah orang			100.000.000,00								0	
	SKM	Jumlah Dokumen SKM			50.000.000				50.000.000				100	
	Operasional Tim Teknis, Pemantauan dan penertiban Perizinan pelayanan pengaduan	Jumlah pengawasan dan pemantauan	100.000.000	100.000.000			40.000.000	70.200.000			40	70,2		
	Operasional Tim Teknis, Pemantauan dan penertiban Perizinan pelayanan pengaduan dan Pengawasan	Jumlah Penertiban Perizinan	100.000.000	100.000.000			40.000.000				40			
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Kenaikan/penurunan Realisasi Nilai Investasi PMDN (Rupiah/Milyar)		975.000.000	837.871.800,00	306.669.000								
	Studi Tiru penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu	Jumlah peserta studi tiru	175.000.000	175.000.000	124.214.000	14.809.000	131.672.000	131.672.000	122.549.533	14.699.414	75	75	98,66	99,26
	Intensifikasi Pelayanan Ijin Kesehatan & Pendidikan	Jumlah perizinan Kesehatan dan pendidikan yang terbitkan	100.000.000	100.000.000	79.329.000,00	59.820.000	40.000.000	80.000.000	75.671.934	59.820.000	40	80	95,39	100
	Intensifikasi Pelayanan Perizinan SIPI, HUPAR, SUJK dan K3	Jumlah perizinan SIPI, HUBPAR, SUJK, dan K3	100.000.000	100.000.000	80.000.000,00	56.000.000	40.000.000	88.000.000	75.850.000	56.000.000	40	88	94,81	100
	Intensifikasi Pelayanan Reklame dan Indakop	Jumlah perizinan Reklame dan Indakop	100.000.000	100.000.000	80.000.000,00	18.000.000	40.000.000	88.000.000	68.400.000	18.000.000	40	88	85,50	100

Rencana Strategis 2023-2026.

	Intensifikasi Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB)	Jumlah Perizinan IMB yang diterbitkan	100.000.000	100.000.000		18.000.000	40.000.000	80.000.000		18.000.000	40	80		100
	Intensifikasi Pelayanan Pengaduan Perizinan	Prosentasi penanganan pengaduan			50.000.000	23.000.000			33.550.000	22.549.200			67,10	98,04
	Intensifikasi Pengawasan Perizinan	Prosentasi Pengawasan Perizinan												
	Peningkatan Kapasitas SDM perizinan IMB	Jumlah peserta peningkatan Kapaitas SDM Perizinan IMB			79.328.800,00				79.328.800				100	
	pengelolaan Data investasi	Prosentasi Pengelolaan Data Investasi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	18.000.000	-	100.000.000	100.000.000	17.953.200		100	100	99,74
	Pelatihan Teknis tenaga IT	jumlah orang	100.000.000	100.000.000			-	89.922.098				89,92		
	Diklat Pelayanan Perizinan (OSS)	Jumlah Peserta				99.040.000				98.633.936				99,59
	Diklat penanaman Modal	jumlah peserta	200.000.000	200.000.000	245.000.000		189.020.000	189.020.000	245.000.000		95	95	100	
	Pengembangan aplikasi SKM dan Kearsipan berbasis elektronik					60.000.000				60.000.000				100
				2.000.000.000	1.651.849.190	764.730.000								

KODE					Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
								2021	2022	2021	2022	2021	2022
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Rp	Rp	Rp	Rp	%	%
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA/PMDN	451.999.900	100.000.000	433.549.900	20.400.000	95,92	20	
2	18	02			Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensifikasi Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah								
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	52.000.000	100.000.000	52.000.000	20.400.000	100	20	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	399.999.900	-	381.549.900	-	95		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta	-	-	-	-			
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN	-	200.000.000	-	177.500.000		89	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ota	Jumlah Even dan Jumlah Jenis	-	200.000.000		177.500.000	88,75		
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Realisasi Nilai Investasi PMDN (Rupiah/Milyar)	436.390.800	800.000.000	434.843.800	120.510.000	100	15	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentasi Pelayanan	260.391.000	450.000.000	258.844.000	74.480.000	99	16,55	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal	Prosentasi Pemantauan Komitmen Perizinan	80.000.000	150.000.000	80.000.000	-	100	-	

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Noperizinan	Prosentasi Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	48.000.000	100.000.000	48.000.000	28.540.000	100	28,54
2	18	04	2.01	04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	47.999.800	100.000.000	47.999.800	17.490.000	100	17,49
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Realisasi Nilai Investasi PMDN (Rupiah/Milyar)	519.161.000	643.394.000	519.161.000	-	100	-
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
2	18	05	2.01	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemantauan	87.120.000	100.000.000	87.120.000	-	100	-
2	18	05	2.01	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan	227.801.000	343.394.000	227.801.000	0	100	-
2	18	05	2.01	03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	204.240.000	200.000.000	204.240.000	-	100	-
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sitem Informasi Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Realisasi Nilai Investasi PMDN (Rupiah/Milyar)						
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota		60.000.000	150.000.000	60.000.000	12.550.000	100	8,37
					Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota							
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentasi Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data Dan Informasi	60.000.000	150.000.000	60.000.000	12.550.000	100	8,37
							1.467.551.700	1.893.394.000	1.447.554.700	330.960.000	99	17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Jayapura Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
BELANJA	8.280.707.000	7.451.299.000	5.727.308.190	4.974.297.000	6.056.926.700	6.407.429.750	7.648.019.000	6.971.517.519	5.648.571.447	4.702.864.321	5.648.339.941	373.960.000	93,27	93,56	98,63	94,54	93,12	5,84	1,18	2,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA OPERASI)	4.036.103.000	4.282.976.000	3.134.859.000	3.300.797.000	3.770.355.000	3.534.530.000	3.546.196.075	3.883.591.839	3.101.420.267	3.042.711.341	3.401.919.941	42.940.000	87,86	90,21	98,93	92,18	90,23	1,21	1,07	2,00
Belanja Pegawai	4.036.103.000	4.282.976.000	3.134.859.000	3.300.797.000	3.770.355.000	3.534.530.000	3.546.196.075	3.883.591.839	3.101.420.267	3.042.711.341	3.401.919.941	42.940.000	87,86	90,21	98,93	92,18	90,23	1,21	1,07	2,00
BELANJA LANGSUNG (BELANJA MODAL)	4.164.600.000	3.168.323.000	2.592.449.190	1.673.500.000	2.286.571.700	2.872.891.750	4.102.862.934	3.107.925.680	2.547.151.180	1.660.152.980	2.238.420.000	338.960.000	98,52	98,09	98,25	99,20	97,89	11,52	1,15	2,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.164.600.000	3.168.323.000	2.592.449.190	1.673.500.000	2.286.571.700	2.872.891.750	4.102.862.934	3.107.925.680	2.547.151.180	1.660.152.980	2.238.420.000	338.960.000	98,52	98,09	98,25	99,20	97,89	11,52	1,15	2,27

Tabel. 2.8

**REALISASI INVESTASI DI KOTA JAYAPURA
BERDASARKAN SURAT IZIN USAHA LAINNYA
TAHUN 2018 – 2022**

NO	JENIS INVESTOR	NILAI INVESTASI				
		2018	2019	2020	2021	JAN - MAR 2022
1	Penanam Modal Asing (PMA)	32.050.000.000	64.051.160.000	66.635.333.531	65.776.539.065	102.915.438.944
2	<i>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</i>	3.087.813.828.701	1.361.558.573.079	13.084.645.470.053	2.610.315.377.828	3.316.836.015.581
a	<i>Usaha Besar (UB)</i>	2.248.171.417.980	459.768.613.453	12.562.323.223.535	1.190.724.177.192	1.603.332.343.965
b	<i>Usaha Menengah (UM)</i>	355.166.637.358	330.676.850.439	255.805.974.478	269.097.926.353	278.175.475.368
c	<i>Usaha Kecil (UK)</i>	260.938.933.363	281.718.808.778	266.516.272.040	941.042.591.423	1.297.727.030.031
d	<i>Usaha Mikro</i>	223.536.840.000	289.394.300.409	-	209.450.682.860	137.601.166.217
3	BUKAN PMA/PMDN	-	-	-	-	1.100.000.000
TOTAL		3.119.863.828.701	1.425.609.733.079	13.151.280.803.584	2.676.091.916.893	3.420.851.454.525

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

- Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Tabel 2.9
**Jumlah Investor PMA dan PMDN dan Realisasi Nilai Investasi
Tahun 2018 s.d 2022**

NO	TAHUN	JUMLAH INVESTOR		NILAI INVESTASI
		PMA	PMDN	
1	2018	7	2020	3,119,863,828,701
2	2019	9	1750	1.425.609.733.079
3	2020	10	2605	13.151.280.803.584
4	2021	3	2913	2.676.091.916.893
5	2022	-	16123	3.420.851.454.525

Tabel 2.10
**Peringkat Investasi Berdasarkan Ijin Usaha di Kota Jayapura
Menurut Lokasi Usaha Tahun 2021**

No	Lokasi Usaha	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rupiah)	Penyerapan Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
1	Distrik Jayapura Utara	641	325,168,422,120.00	14.440	3
2	Distrik Jayapura Selatan	871	292,867,777,670.00		
3	Distrik Abepura	727	255,527,529,618.00		
4	Distrik Heram	484	87,856,837,795.00		
5	Distrik Muara Tami	186	15,763,949,165.00		

Tabel 2.11

Perkembangan rekapitulasi jumlah Investasi Berdasarkan Izin Jasa Usaha Menurut Kualifikasi Usaha Tahun 2021

No	Kualifikasi Usaha	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Kecil	904	941.042.591.423
2	Menengah	138	269.097.926.353
3	Besar	331	1.190.724.177.192
4	Usaha Mikro	1540	209.450.682.860
	Jumlah	2.916	2.676.091.916.893

2.3.2. Kinerja Pelayanan Perizinan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dan Peraturan Walikota Jayapura No.28 tahun 2017 tentang Pendegelasan sebagian kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura serta Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai mengelola perizinan sebanyak 79 kewenangan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (PMPTSP) Kota Jayapura.

Tabel 2.12

Terhadap kinerja dari 79 jenis pelayanan Perizinan tersebut dapat dilihat pada tabel Berikut:

No	JENIS PERIZINAN	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Surat Izin Tempat Usaha	4857	4.555	4.400	4015
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1891	1758	2199	
3	Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2007	1648	1.010	
4	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	181	49	35	
5	Surat Izin Perikanan (SIUP) Budidaya	2	39	35	
6	Surat Izin Tanda Industri (TDI)	146	113	78	
7	Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	54	42	42	
8	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)	709	711	556	324
9	Surat Izin Usaha Jasa Impresial				
10	Surat Izin Agen Biro Perjalanan Wisata				
11	Surat Izin Usaha Bar, Diskotik Dan PUB				
	Bilyar	2	7	0	2
	Bar dan Diskotik	4	2	17	3
12	Surat Izin Café	20	12	98	7
13	Surat Izin Hiburan				
14	Surat Izin Hotel	12	19	66	10
15	Surat Izin Usaha Industri (IUI)			1	
16	Surat Izin Panti Pijat	10	9	29	4
17	Surat Izin Karaoke	10	12	38	5
18	Surat Izin Kerja Malam Wanita		22	7	11
19	Surat Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (FUNSTATION)		1	1	
20	Surat Izin Obyek dan Daya Tarik				

	Wisata (Kolam Renang)				
21	Surat Izin Obyek Dan Daya Tarik wisata (Lapangan Golf)				
22	Surat Izin Obyek dan Daya Tarik wisata (Pangkas Rambut)	15	14	55	7
23	Surat Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Pemancingan)	1	2	7	
24	Surat Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Salon Kecantikan)	13	8	91	2
25	Surat Izin Obyek dan Daya arik Wisata (Taman Hiburan)	1		1	
26	Surat Izin Pendirian Taman Bermain Anak				
27	Surat Izin Reklame	49	24	25	18
28	Surat Izin Restoran	7	2	34	4
29	Surat Izin Rumah Makan		36	167	
30	Surat Izin Travel			1	1
31	Surat Izin Trayek	1.821	1.911	1.319	1075
32	Surat Izin Toko Modern				
33	Surat Izin Tanda Pendaftaran Waralaba				
34	Surat izin Usaha Warung Makan		39	302	19
35	Keterangan Penyimpanan Barang				
36	Surat Izin Perluasan Industri				
37	Persetujuan Prinsip Bidang Industri				
38	Izin Usaha Kepariwisataaan				
39	Izin Prinsip Tata Ruang	35	31	0	
39	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	677	902	1.096	2.643
40	Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)				
41	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IPPPM)				
42	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (IPPPM)				
43	Izin Usaha Penaman Modal (IUPM)	46			
44	Izin Usaha Perluasan Penanaman				

	Modal				
45	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal				
46	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (MERGER)				
47	Surat Izin Gangguan (HO)				
49	Surat Izin Laik Sehat a. Izin TPM b. Izin TTU	274 17	274 26	130 22	226 21
50	Surat Izin Produksi Industri Rumah Tangga	30	38	30	58
51	Surat Izin Depot Air Minum	23	31	24	31
52	Surat Izin Apotik	46	38	32	47
53	Surat Izin Praktek Apoteker. a. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) b. Surat Izin Praktek Apoteker (SIKA)	60 21	74 21	61 0	116 0
54	Surat Izin Praktek dokter Umum, Spesialis dan Gigi a. Surat Izin Praktek Dokter Umum	114	107	117	135
	b. Surat izin Praktek Dokter Spesialis	138	82	96	110
23	c. Surat izin Praktek Dokter Gigi d. Surat izin Praktek Dokter Intersip e. Surat Izin Praktek Dokter Recident. f. Surat Izin Kerja Penata Anatesi	39 114	15 102 1	27 132	23 129
55	Surat Izin Toko Obat	50	9	10	7
56	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi a. Surat Izin Kerja Gizi		15	23	
57	Surat Izin Praktek Perawat a. Izin Kerja Perawat b. Izin kerja Perawat Gigi c. Surat Izin Teknikal Gigi	10 1	4	1	6

58	Surat Izin kerja dan Praktek Bidan a. Surat Izin Kerja Bidan b. Surat Izin Praktek Bidan	125 7	135 5	3 78	5 84
59	Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Laboratorium Medik (SIP-TTLM)	124	75	31	84
60	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5	27	0	3
61	Surat Izin Kerja Radiografer	4	13	3	4
62	Surat Izin Kerja dan Praktek Fisioterapi	6	12	3	3
63	Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian	91	98	64	133
64	Surat Izin Tenaga Pengobat Tradisional	9	0	9	8
65	Surat izin Rekam Medis	6	5	3	2
66	Surat Izin Kerja Perawat	676	659	189	291
67	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien				
68	Surat Izin Operasion Laboratorium a. Surat Izin Kerja Tenaga Laboratorium	125	75	5	16
69	Surat Izin Operasional Salon	10	12	5	6
70	Surat Izin Operasional Klinik a. Izin Klinik (Non Inap) b. Izin Klinik Kecantikan	11 11	15 2	4 0	21
71	Surat Izin Operasional Optikal a. Surat Izin Tenaga RO	1	5	3	1
72	Surat Izin Operasional PUD dan PKBM a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional PKBM	114 10	110 13	84 7	115 10
73	Surat Izin Operasional Sekolah a. Izin Sekolah SMP/SLTP b. Izin Sekolah SMA/SLTA	5 2	5 2	11 17	27 8
74	Surat Izin Operasional Kursus-Kursus dan Lembaga Pendidikan	10	17	9	8

75	Surat izin Operasional rumah Sakit	5	3	4	3
76	Surat Izin Operasional Puskesmas	7	11	11	
	a. Surat Izin Balai Pengobatan	0	1	4	
77	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	86	91	79	61
78	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	86	29	36	50
79	Izin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jayapura Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah, struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura. Telah merubah tupoksi kelembagaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan menjadi Perangkat Daerah Teknis.

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kota Jayapura yang memiliki luas Wilayah 940.Km2 dengan jumlah penduduk 362.998 jiwa pada tahun 2021 dengan potensi unggulan pada sector Kontruksi, Perdagangan dan Jasa, Informasi dan Komunikasi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Real Estate,

Transportasi dan pergudangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Industri Pengolahan. Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kota Jayapura.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Jayapura antara lain:

- Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan Kota Jayapura di dalam dan luar Negeri;
- Optimalisasi Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Perpres RI No. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jayapura dengan pendelegasian kewenangan Walikota sesuai Peraturan Walikota Jayapura Nomor 28 tahun 2017 kepada penyelenggara PTSP sebanyak 79 jenis Pelayanan. Perda tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan Isu Strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Jayapura. Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi: 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang kurangnya meliputi: 1). Pelaksanaan Pelayanan,

2). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3). Pengelolaan Informasi 4). Pengawasan Internal 5). Penyuluhan Kepada Masyarakat dan 6). Pelayanan Konsultasi.

Tabel 3.1
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Jayapura**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi Standar target • Pelayanan administrasi Perizinan belum memenuhi standar target 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan, • Data Peluang Investasi masih belum <i>up to date</i>, • SOP dan Standar Pelayanan masih belum <i>up to date</i> sesuai dengan jumlah jenis pelayanan, • Kurangnya kesadaran Insvestor untuk melaporkan Perkembangan usahanya, • Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan Pelaksanaan Penanaman modal masih Belum tercapai • Pengaduan Proses Pelayanan Perizinan terpadu belum mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> • mekanisme pengaduan kurang jelas • Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optimal

<p>3. Pengelolaan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infra struktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan baik • Data base dan aplikasi Perizinan • Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Perangkat Daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP • Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis
<p>4. Pengawasan Internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target <input type="checkbox"/> Monev Pelayanan perizinan terpadu belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Manajemen penatalaksanaan, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
<p>5. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Saprass pendukung masih terbatas <input type="checkbox"/> Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah
<p>6. Sumber daya aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan Penanaman Modal dan PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan

3.2. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, Standar Pelayanan, SOP;
2. Data Peluang Investasi masih belum *up to date*;
3. Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan perkembangan usulannya;
4. Kurangnya komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan;
5. Mekanisme Pengaduan kurang jelas;
6. Peningkatan kompetensi SDM belum optimal;
7. Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP;
8. Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis;
9. Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal;
10. Sapras pendukung masih terbatas;
11. Kualitas dna kuantitas SDM pelaksana;
12. Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kota Jayapura dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada tujuan menciptakan Kota Jayapura sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan sasaran menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan tertatanya sector jasa dan perdagangan dengan capaian program peningkatan investasi daerah, kerjasama perdagangan antar daerah dan kawasan dengan indicator meningkatnya penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan harapan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Arah kebijakan terkait hal tersebut diantaranya:

1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura, terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan pola ruang. Kawasan prioritas yang akan dikembangkan meliputi:

A. Kawasan Strategis Khusus I (satu)

1. Kawasan Strategis Dari Kepentingan Ekonomi yaitu kawasan agropolitan dan Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa yang bertempat di Distrik Muara Tami adalah bertempat di Kelurahan Koya Barat; Kelurahan Koya Timur; Kampung Koya Tengah; Kampung Holtekamp; Kampung Skow Mabo; dan Kampung Skow Sae.

2. Kawasan pusat pelayanan perdagangan dan jasa terletak di:
 - a. Kawasan Pusat Kota terletak di Kelurahan Gurabesi dan Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kawasan ini merupakan kawasan ekonomi kota yang sudah tumbuh dan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - b. Kawasan Pasar Sentral Hamadi dan Pusat Pelelangan Ikan di Kelurahan Hamadi Kawasan ini merupakan kawasan ekonomi Kota yang sudah tumbuh dan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - c. Kawasan Entrop dan Papua Trade Center (PTC) di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kawasan ini merupakan potensi ekonomi cepat tumbuh yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Kawasan Abe di Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Yobe, Kelurahan Awiyo, dan Kelurahan Asano Distrik Abepura Kawasan ini merupakan potensi ekonomi cepat tumbuh yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - d. Kawasan Waena di Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena, dan Kampung Waena Distrik Heram; Kawasan ini merupakan potensi ekonomi cepat tumbuh yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - e. Kawasan Skouw di Kampung Skouw Mabo dan Kampung Skouw Sae. Kawasan ini merupakan potensi ekonomi cepat tumbuh dan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di kota.
3. Kawasan Pelabuhan Jayapura Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.

B. Kawasan Strategis Khusus II (dua)

Kawasan strategis dari kepentingan sosial dan budaya di Kota Jayapura adalah kawasan perkampungan masyarakat Port Numbay yang terdiri atas Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara; Kampung Tobati dan Kampung Tahima Soroma terletak di Distrik Jayapura Selatan; Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso terletak di Distrik Abepura; Kampung Waena dan Kampung Yoka terletak di Distrik Heram; dan Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso terletak di Distrik Muara Tami.

C. Kawasan Strategis Khusus III (tiga)

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Jayapura adalah:

1. Kawasan prioritas konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Muara Tami
DAS Muara Tami merupakan salah satu sungai besar di Kota Jayapura dan menjadi daerah aliran sungai lintas Kota dan provinsi yang muaranya menuju Samudera Pasifik. Kawasan ini memberikan perlindungan terhadap keseimbangan tata guna air, dan aset kota untuk memberikan perlindungan ekosistem, flora dan atau fauna.
2. Kawasan CA. Cycloops terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram. Kawasan Cagar Alam Cycloops merupakan cagar alam lintas Kota. Sebagian wilayah CA. Cycloops berada di Kota Jayapura dan Kota Jayapura. Kawasan ini menjadi strategis, karena merupakan tempat perlindungan hayati, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, serta memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota.
3. Kawasan Teluk Youtefa terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura. Kawasan Teluk Youtefa yang dimaksud adalah taman wisata alam, cagar budaya, serta hutan lindung Teluk Youtefa. Kawasan ini menjadi strategis daya dukung lingkungan hidup, karena tidak hanya strategis tempat perlindungan hayati, melainkan juga kawasan ini merupakan muara perairan dari segala aktivitas yang ada di hulu.

4. Kawasan waterfront city yang terletak di:
 - a. Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Mandala, Kelurahan Kel
 - b. Kelurahan Numbai, Kelurahan Argapura, dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan. Kawasan waterfront city menjadi strategis daya dukung lingkungan hidup, karena kawasan ini menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan perairan dan merupakan kawasan rawan bencana gelombang pasang.

Berdasarkan analisis RTRW dan KLHS diharapkan dapat menjadi informasi dan daya tarik investor untuk berinvestasi mengembangkan kawasan terpadu diatas.

3.4. Analisis SWOT

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis adalah

proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta factor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strength)

- Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
- Peraturan Daerah 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura PPTSP dan Peraturan Walikota Jayapura NOmor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten)
- Belum optimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online
- Data Peluang investasi belum up to date
- Belum terdelegasikannya tim teknis dalam kantor DPMPTSP dari OPD teknis yang menerbitkan rekomendasi perizinan terkait.

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non Departemen/swasta
- Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri.

d. Tantangan (Threat)

- Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
- Pasar bebas;
- Peraturan Mendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin dan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
- Belum tergalinya potensi perizinan di Kota Jayapura;
- Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan Usahanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Menyelaraskan Maklumat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yaitu dengan mentelaah bahwa informasi merupakan hak setiap orang, maka selaku merupakan kebutuhan penyelenggara Layanan Informasi Publik DPMPTSP Kota Jayapura, terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

- a. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kota jayapura
- b. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kota Jayapura;
- c. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- d. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;
- e. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
- f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang penanaman modal dan perizinan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kota Jayapura;
- b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perizinan;
- c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginnya;
- d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang penanaman modal dan perizinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;
- e. Meningkatnya layanan perizinan melalui PTSP.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja DPMPSTSP Kota Jayapura

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UMUM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Nilai Investasi Penanam Modal asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	2913	2963	3013	3063	3063
		Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	2.894.461 juta	3.010.239 juta	3.130.649 juta	3.255.874 juta	3.255.874 juta
		Prosentasi Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN	4%	4%	4%	4%	4%
		Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2	2	2	2	8
Terwujudnya kepercayaan Publik terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81%	83%	84%	85%	85%
Terwujudnya Branding pelayanan yang berkualitas dan profesional	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perizinan	Jumlah Apatur yang telah mengikuti Diklat	3	3	3	3	12
		Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas	B	B	B	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi :

- a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;
- b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;
- c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Mengoptimalkan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5.2. Kebijakan :

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
- c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perizinan bagi investor;
- d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- e. Merumuskan sistem kerjasama investasi;
- f. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perizinan;
- g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- h. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perizinan
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan;
- j. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU
Meningkatnya Investasi di Kota Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Investasi PMDN/PMA Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Investasi PMDN/PMA Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Investasi berskala nasional PMDN/PMA Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. Perizinan Jumlah Kategori investasi yang dipromosikan
Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Nilai Investasi skala Nasional di Kota Jayapura meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Investasi Presentasi evaluasi nilai investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Investasi Presentasi evaluasi nilai investasi berskala Nasional
Fluktuasi Kenaikan dan Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi kenaikan dan penurunan nilai realisasi Investasi PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> Fluktuasi kenaikan dan penurunan nilai investasi PMA/PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pelayanan Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pelayanan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan disajikan pada tabel 6.1 berikut

Tabel 6.1

RUTIN

Rencana Program Kegiatan dan pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	
											2023		2024		2025		2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat							Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85	86		87		88		89		89		89
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	21	21	21		21		21		21		21		21
		2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA NILAI SAKIP	77,22	77,67	78,12	2.555.288.000	78,57	3.043.000.000	79,02	2.948.000.000	79,47	2.953.000.000	79,92	11.499.288.000	
		2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	7	22.500.000	7	22.500.000	7	22.500.000	7	22.500.000	7	90.000.000	
		2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	7	22.500.000	7	22.500.000	7	22.500.000	7	22.500.000	28	90.000.000	
		2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31	31	29	557.400.000	29	557.400.000	29	557.400.000	29	557.400.000	116	2.229.600.000	
		2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	17	15	542.400.000	15	542.400.000	15	542.400.000	15	542.400.000	60	2.169.600.000	
		2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14	14	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	56	60.000.000	

2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	0	0	4	178,200,000	4	178,200,000	4	178,200,000	4	178,200,000	16	712,800,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah 4 Jenis Pakaian Dinas dan Jenis Atribut ASN dan Non ASN	0	0	4	178,200,000	4	178,200,000	4	178,200,000	4	178,200,000	16	712,800,000
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	9	26	26	1,409,168,000	26	1,469,668,000	26	1,469,668,000	26	1,469,668,000	77	5,818,172,000	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	0	2	2	251,211,000	2	251,211,000	2	251,211,000	2	251,211,000	2	1,004,844,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis	2	2	2	14,300,000	2	14,300,000	2	14,300,000	2	14,300,000	8	57,200,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	2	2	2	50,000,000	2	110,500,000	2	110,500,000	2	110,500,000	8	381,500,000
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	104,417,000	4	104,417,000	4	104,417,000	4	104,417,000	16	417,668,000
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis	0	2	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	8	300,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi di Dalam dan Luar Daerah	1	7	7	564,240,000	7	564,240,000	7	564,240,000	7	564,240,000	7	2,256,960,000
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip/Tahun	0	5	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	20	400,000,000
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis	0	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	8	1,000,000,000
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	0	100	100	100,000,000	100	300,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	0	15 Unit/ Jenis 4	15 Unit/ Jenis 4	100,000,000	15 Unit/ Jenis 4	300,000,000	15 Unit/ Jenis 4	200,000,000	15 Unit/ Jenis 4	200,000,000	15 Unit/ Jenis 4	800,000,000
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	1472	1618	11	209,020,000	11	310,232,000	11	310,232,000	11	310,232,000	44	1,139,716,000	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	10	10	10	9,020,000	10	9,020,000	10	9,020,000	10	9,020,000	40	36,080,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Porsi dan Jenis Bahan serta 1 Paket/Tahun Jasa Kebersihan	1462	1608	1	200,000,000	1	301,212,000	1	301,212,000	1	301,212,000	4	1,103,636,000
2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	10	32	31	79,000,000	33	205,000,000	33	210,000,000	33	215,000,000	130	709,000,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	0	2	1	48,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	10	288,000,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	0	20	20	20,000,000	20	25,000,000	20	30,000,000	20	35,000,000	80	110,000,000
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	10	10	10	11,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	40	311,000,000
TOTAL ANGGARAN RUTIN									2,555,288,000	3,043,000,000	2,948,000,000	2,953,000,000	11,499,288,000					

KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	
											2023		2024		2025		2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha							Nilai Investasi	8.158.579.873.238	9.842.168.821.413	2.894.461.017.310		3.010.239.458.003		3.130.649.036.323		3.255.874.997.776		22.133.393.330.825		
	Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN/PMA						Regulasi Penanaman Modal	4	4	4		4		4		4		4		
		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA	59.997.600.000	73.330.400.000	71.143.904.652.00	700.000.000	73.989.660.838	1.100.000.000	76.949.247.272	1.100.000.000	80.027.217.163	1.100.000.000	4.000.000.000	
							Nilai Investasi PMDN	8.098.582.273.238	9.768.838.421.413	2.823.317.112.658.00		2.936.249.797.165		3.053.699.789.051		3.175.847.780.613				
		2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Intensif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	10	12	12	200.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	48	1.400.000.000
		2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	2	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	700.000.000
		2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	10	10	10	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	40	700.000.000
		2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	0	10	10	500.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	2.600.000.000
		2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	0	10	10	500.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	2.600.000.000

	Meningkatnya Promosi dan Investasi					Jumlah Investor	6934	8467	2916	550.000.000	2966	600.000.000	3016	600.000.000	3066	600.000.000	3130	2.350.000.000		
		2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA	26	46	6	550.000.000	6	6	600.000.000	6	600.000.000	70	2.350.000.000		
							Jumlah Investor PMDN	6908	8421	2910		2960	3010		3060		3060			
		2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan promosi	0	10	6	550.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	34	2.350.000.000	
		2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	0	10	3	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	22	750.000.000
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	0	0	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	12	1.600.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	800.000.000	83	1.050.000.000	84	1.050.000.000	85	1.050.000.000	85		
		2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	10006	974	1024	800.000.000	1074	1.050.000.000	1124	1.050.000.000	1174	1.050.000.000	5370	3.950.000.000	
		2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	800.000.000	83	1.050.000.000	84	1.050.000.000	85	1.050.000.000	85	3.950.000.000	
		2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas	480	720	960	450.000.000	1200	450.000.000	1200	450.000.000	1200	450.000.000	5280	1.800.000.000
		2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	133	143	153	150.000.000	163	200.000.000	173	200.000.000	183	200.000.000	815	750.000.000

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8	10	13	100,000,000	15	200,000,000	17	200,000,000	20	200,000,000	75	700,000,000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Intensif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	0	4	4	100,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	16	700,000,000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Kenaikan/penurunan realisasi nilai investasi PMDN (Rp/Milyar)	-0.17	2.40	-0.04	700,000,000	-0.04	900,000,000	-0.04	900,000,000	-0.04	900,000,000	2.25	3,400,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data profil dan informasi pelaku usaha	12	12	312	700,000,000	316	900,000,000	316	900,000,000	316	900,000,000	1272	3,400,000,000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	4	6	100,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	30	700,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	4	300	350,000,000	300	400,000,000	300	400,000,000	300	400,000,000	1200	1,550,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	4	4	6	250,000,000	8	300,000,000	8	300,000,000	8	300,000,000	30	1,150,000,000

		2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	2	2	3	150.000.000	3	250.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	17	900.000.000	
		2	18	06	2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2	2	3	150.000.000	3	250.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	17	900.000.000	
		2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	3	150.000.000	3	250.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	17	900.000.000
TOTAL											2.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		14.600.000.000	

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura



FILLEP G. HAMADI, SE
 Kepala Dinas TK. I (IV/b)
 NIP. 19771025 200301 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya indikator kinerja yang digunakan adalah indikator yang telah dikembangkan dari hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, strategi dan program yang mengakibatkan baik langsung ataupun tidak langsung tercapainya tujuan dan sasaran disusun guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi pemanfaatan hasilnya.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang kemudian diselaraskan untuk mencapai tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan DPMPTSP Kota Jayapura. Dapat dilihat secara rinci pada tabel.

Tabel 7.1

Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja DPMPSTP Kota Jayapura

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UMUM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Nilai Investasi Penanam Modal asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	2913	2963	3013	3063	3063
		Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	2.894.461 juta	3.010.239 juta	3.130.649 juta	3.255.874 juta	3.255.874 juta
		Prosentasi Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN	4%	4%	4%	4%	4%
		Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2	2	2	2	8
Terwujudnya kepercayaan publik terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81%	83%	84%	85%	85%
Terwujudnya Branding pelayanan yang berkualitas dan profesional	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perizinan	Jumlah Apatur yang telah mengikuti Diklat	3	3	3	3	12
		Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas	B	B	B	BB	BB

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 disusun, sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perizinan di Kota Jayapura.

Jayapura, 18 Mei 2022

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



FILLEP C. HAMADI, SE
Pemerintah Kota Jayapura, TK. I (IV/b)
NIP. 19771025 2003011 001